

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DALAM MEMENUHI  
KEWAJIBANNYA DI KOTA SEMARANG**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
memperoleh derajat S-2 Magister Akuntansi



**Diajukan Oleh :**

**Nama : SUBAGIONO TJONDRO  
NIM : C4C099238**

**Kepada Program Studi Magister Akuntansi  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro  
Pada Desember 2002**



## ABSTRACT

The research is to examine the impact of internal control system to the taxpayer hotel compliance in keeping taxation obligatory. The expectation in the topic research is sharing knowledge about discipline of the taxpayer in Semarang City, that giving contributions for academicians in order to progress the knowledge and government also, especially for regional income service in the expectation for the increasing incomes of regional treasury by drawing hotel taxes. Besides, giving inputs to actative regional autonomy era. Its looks so important in autonomy era, it is demanded to be autonomous for supplying their own regional necessities.

Concerning to the topic, the research populations are hotels in Semarang which it has fourth three hotels in any classes. In this research, the internal control system has been measure by three indicator. They are controlling area, accountancy system and controlling system. The research data are divided into two data. Spreading the primer data by quisioner and getting the secondary data from tourism service, regional financial management service and any relevant service. The hypothesis test is examined with analysis multiple regression.

Based on the result of the empiric examination shows two variable impact significantly accountancy system and controlling prosedures toward taxpayer compliance in alpha level 5%.

The key words : Hotel taxes, Internal Control System, Controlling area, Accountancy system and Controlling procedures.

## ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dalam melakukan kewajiban perpajakan. Penelitian dalam topik ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak hotel di kota Semarang, sehingga memberikan kontribusi bagi akademisi untuk pengembangan pengetahuan, juga pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan perolehan masukan ke kas daerah lewat penarikan pajak hotel. Disamping itu memberikan masukan dalam penentuan seperangkat kebijakan pajak daerah, terutama dalam era otonomi daerah yang sedang digalakkan. Hal ini sangat penting karena di era otonomi, daerah dituntut untuk mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing.

Berkaitan dengan topik tersebut, populasi penelitian ialah perusahaan perhotelan yang ada di kota Semarang, yang berjumlah 43 hotel dari berbagai kelas. Sistem pengendalian intern dalam penelitian ini diukur dengan tiga indikator yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian. Data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu lewat penyebaran kuisioner dan data sekunder yang berupa data yang diperoleh dari dinas pariwisata, dinas pengelolaan keuangan daerah, dan sumber lain yang dianggap relevan. Uji hipotesis di Uji dengan *Multiple regression analysis*.

Hasil pengujian empirik menunjukkan dua variabel berpengaruh secara signifikan yaitu sistem akuntansi dan prosedur pengendalian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan tingkat alfa 5%.

Kata-kata Kunci : Pajak Perhotelan, sistem pengendalian intern, lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, prosedur pengendalian.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmatNYA, karena hanya dengan petunjukNYA saya telah berhasil menyelesaikan penyusunan tesis, tanpa ada halangan yang berarti.

Tesis ini menjelaskan tentang pengujian pengaruh sistem pengendalian intern (lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan hotel di lingkungan perusahaan perhotelan di kota Semarang. Penelitian ini dirasa cukup menarik di era otonomi daerah, dimana masing-masing daerah dituntut untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Untuk itu maka pemerintah daerah mencoba menggali potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak perhotelan merupakan salah satu bidikan PAD (Pendapatan asli daerah) yang cukup potensial untuk dapat digalakkan guna peningkatan PAD. Sehingga wajar bila pengembangan dalam penelitian ke arah topik tersebut dianggap masih relevan. Dalam penelitian ini, bertujuan disamping pengembangan ilmu pengetahuan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam rangka penetapan kebijakan daerah dalam kaitannya dengan pajak perhotelan. Sehingga pemerintah dapat memantau lebih akurat pada kepatuhan wajib pajak dan mampu mendorong serta meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak perhotelan.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Drs. Kholiq Machfud, M.Si, selaku pembimbing satu, yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis.
2. Ibu Dra. Zulaikha, M.Si, selaku pembimbing dua, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan tesis.
3. Bapak Drs. M. Nasir, M.Si, Akt, ketua Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan spirit baik langsung maupun tidak langsung.
4. Bapak Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Semarang
5. Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang
6. Teman-teman seangkatan yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan tesis.

Tiada kata yang paling pantas dan patut saya sampaikan, selain ucapan terima kasih, atas dorongan dan partisipasinya kepada penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya.

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRACT .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU .....	7
2.1. Telaah Pustaka .....	7
2.1.1. Pengertian Pajak .....	9
2.1.2. Pengertian Pajak Perhotelan .....	12
2.1.3. Subyek dan Wajib Pajak .....	14
2.1.4. Obyek Pajak .....	15
2.2. Struktur Pengendalian Intern .....	16
2.2.1. Pengertian Struktur Pengendalian Intern .....	16
2.2.2. Fungsi Struktur Pengendalian Intern .....	18
2.2.3. Unsur-unsur Pengendalian Intern .....	18
2.2.3.1. Lingkungan Pengendalian .....	18
2.2.3.2. Sistem Akuntansi .....	21
2.2.3.3. Prosedur Pengendalian .....	22
2.3. Kepatuhan Wajib Pajak .....	23

2.4.	Penelitian Sebelumnya .....	25
2.5.	Kerangka Penelitian Teoritis .....	27
2.6.	Hipotesis .....	29
BAB III	METODE PENELITIAN .....	30
3.1.	Jenis dan Sumber Data .....	30
3.2.	Populasi dan Sampel .....	30
3.3.	Metode Pengumpulan Data .....	32
3.4.	Operasional Variabel Penelitian .....	32
3.5.	Analisis Data .....	35
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	38
4.1.	Gambaran Umum Responden .....	38
4.2.	Uji Validitas dan Reliabilitas .....	41
4.3.	Uji Asumsi Klasik .....	44
	4.3.1. Uji Multicollinearitas .....	44
	4.3.2. Uji Heteroscedastisitas .....	46
	4.3.3. Uji Autocorrelation .....	46
4.4.	Hasil Analisis Regresi .....	47
4.5.	Uji Hipotesis .....	48
4.6.	Pembahasan .....	52
4.7.	Implikasi Hasil Penelitian .....	57
	4.7.1. Implikasi Bagi Manajemen .....	57
	4.7.2. Implikasi Bagi Pihak Luar Manajemen .....	61
BAB V	PENUTUP .....	62
5.1.	Kesimpulan .....	62
5.2.	Keterbatasan Penelitian .....	65
5.3.	Saran Untuk Penelitian Yang Akan Datang .....	66
	DAFTAR PUSTAKA .....	67
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Hotel dan Klasifikasinya di Kota Semarang .....	4
Tabel 3.1. Karakteristik Hotel Ditinjau Dari Kamar .....	31
Tabel 4.1. Responden Penelitian .....	39
Tabel 4.2. Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan .....	40
Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Instrumen Lingkungan Pengendalian .....	41
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Sistem Akuntansi ..	42
Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Prosedur Pengendalian .....	43
Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan .....	44
Tabel 4.7. Multicollinearitas .....	45
Tabel 4.8. Hasil ANOVA .....	49
Tabel 4.9. Koefisien Regresi .....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis .....	28
Gambar 2.2. Hubungan Variabel Dependen dengan Variabel Independen...	29
Gambar 4.1. Scatterplot .....	46

## BAB.I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan mempercepat laju pembangunan, maka perlu terus ditingkatkan seoptimal mungkin penerimaan daerah melalui penerimaan sumber pendapatan daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-Undang Republik Indonesia, No 25 Tahun 1999). Hal ini didasarkan pada implikasi dari kebijakan otonomi daerah dimana masing-masing daerah dituntut untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri, sehingga masing-masing daerah harus mampu meningkatkan hasil pendapatan daerah (PAD). Salah satu alternatifnya adalah dengan mengintensifkan kenaikan pajak perhotelan sebagai salah satu bentuk pajak daerah.

Berdasarkan *coverage ratio*, yaitu rasio antara pendapatan sesungguhnya dengan potensi pajak secara teoritis, bahwa pajak daerah khususnya mengenai pajak hotel (pajak yang dipungut sebesar 10 % oleh Pemerintah Daerah atas setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel; Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 1997, Pasal 2 ayat 2c, Perda Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang No 3 tahun 1998 sebagaimana dirubah UU No 34 tahun 2000), diperkirakan baru sekitar antara 50% - 45% (Erata, I Made Gde, 1991 :62). Dengan demikian masih besar potensi pajak daerah yang harus diupayakan realisasinya, yaitu sekitar 50% - 55%. Oleh karena itu, pemungutan pajak akan terus dilaksanakan dan ditingkatkan berdasarkan azas keadilan dan pemerataan. Peningkatan penerimaan

pajak daerah akan mampu berfungsi sebagai alat penunjang pembangunan serta mendukung otonomi daerah. Peranan penerimaan pajak daerah dalam APBD semakin meningkat, hal ini dengan sendirinya tidak bisa terlepas dari peranan akuntansi. Dalam rangka untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Wajib Pajak (WP) Hotel disamping harus menyelenggarakan pembukuan, harus pula melengkapi dengan laporan keuangan yang berupa neraca dan perhitungan laba-rugi serta keperluan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya pajak hotel yang telah dipungut dan harus disetorkan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Dati II Semarang No.5 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Perda Dati II No. 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel. Informasi akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan yang andal sangat dipengaruhi oleh struktur pengendalian intern yang ada dalam perusahaan. Oleh karena itu, manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menjamin terselenggaranya struktur pengendalian intern yang memadai dalam perusahaan (Charmichael & Willingham 1987 ;146).

Manajemen memandang pengendalian sebagai perspektif pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif, ini berarti bahwa manajemen mempunyai kepentingan yang lebih besar dalam pengamanan terhadap *assets* perusahaan, menjamin ketepatan, dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Manajemen yang merancang struktur pengendalian intern (Arrens and Loebbecke 1992 ;283 ) secara efektif mempunyai empat tujuan pokok,yaitu:

- (1) untuk memberikan data yang dapat diandalkan
- (2) untuk mengamankan assets dan catatan-catatan
- (3) untuk meningkatkan efisiensi operasional
- (4) untuk mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen .

Tujuan struktur pengendalian intern yang lebih penting dari yang lain adalah untuk memberikan jaminan bahwa proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal. Dengan kata lain penerapan struktur pengendalian intern secara tepat dan tegas akan dapat menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan, yang akhirnya akan menentukan ketepatan penghitungan pajak yang akan disetor ke kas negara. Dengan demikian tingkat kepatuhan dan ketepatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dapat terbantu dan terjamin.

Sebaliknya apabila suatu perusahaan tidak menerapkan struktur pengendalian intern, maka keandalan dan ketelitian data akuntansi atau pembukuan yang menghantarkan penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan kurang dapat dipertanggung jawabkan. Pada gilirannya hasil perhitungan dan penyampaian pajak oleh wajib pajak patut diragukan.

Suharto (1995) melakukan penelitian tentang “Hubungan Laporan Audit Akuntan Publik dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak dengan Keputusan Tindakan Pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Timur” Hasilnya menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak yang dilampiri laporan audit akuntan publik, kecil kemungkinannya dilakukan tindakan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan

Pajak". Ini terbukti bahwa ketepatan dan keandalan internal kontrol yang merupakan sumber analisis dalam audit guna keyakinan kebenaran data yang diaudit bagi auditor, berimplikasi pada ketepatan data yang diaudit, sehingga wajar bila laporan keuangan yang telah diaudit yang dibuktikan lewat opini akuntan publik, lebih dapat dipercaya dari pada laporan keuangan perusahaan yang belum diaudit. Akhirnya pihak pajak tak perlu sangsi atas pelaporan pajak yang dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Penelitian ini juga diilhami dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kiryanto (1998) tentang "Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Pajak Penghasilannya, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan Struktur pengendalian Intern mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan dengan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban Pajak penghasilannya. Hasil penelitian ini mendukung tentang perlunya penilaian struktur pengendalian intern dalam setiap penugasan pemeriksaan dalam setiap perusahaan (norma pemeriksaan)

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah pajak hotel di kota Semarang yang berjumlah 46 Hotel dengan klasifikasi seperti terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel: 1.1  
Jumlah Hotel dan Klasifikasinya  
Di Kota Semarang

Klasifikasi Hotel	Jumlah
Jasmine Hotel/Hotel Melati	18 buah
Star Hotel/Hotel Bintang Satu (*)	15 buah
Star Hotel/Hotel Bintang Dua (**)	7 buah
Star Hotel/Hotel Bintang Tiga (***)	2 buah
Star Hotel/Hotel Bintang Empat (****)	3 buah
Star Hotel/Hotel Bintang Lima (*****)	1 buah
Jumlah	46

Sumber : data primer diolah

Mengingat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu seperti tersebut diatas, maka penelitian ini mencoba untuk menguji kembali tentang pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dalam memenuhi kewajibannya di kota Semarang . Atas dasar itulah maka dalam penelitian ini judul yang diketengahkan adalah :

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA DI KOTA SEMARANG**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diketengahkan adalah sebagai berikut:

**Bagaimanakah pengaruh penerapan struktur pengendalian intern dengan kepatuhan wajib pajak hotel dalam memenuhi kewajiban pajak hotelnya ?**

**1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah , penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis hotel-hotel yang ada di kota Semarang dengan berbagai kelas.
2. Menganalisis struktur pengendalian intern hotel-hotel yang ada di kota Semarang dari berbagai kelas.
3. Menguji secara empiris pengaruh struktur pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dalam memenuhi kewajibannya.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah (Dinas Pendapatan Daerah/ Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) tentang peranan Struktur Pengendalian Intern terhadap Kewajiban Wajib Pajak Hotel dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotelnya untuk penyusunan kebijakan perhotelan di Kota Semarang.
2. Memberikan dasar yang kuat bahwa penerapan Struktur Pengendalian Intern didalam suatu hotel/perusahaan mutlak diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.
3. Menambah bahan bacaan bagi penelitian lebih lanjut pada bidang auditing dan perpajakan serta dalam rangka untuk mengembangkan ilmu.

## BAB. II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU

#### 2.1. Telaah Pustaka

Dalam suatu perusahaan yang hanya terdiri dari seorang pimpinan dan satu atau dua bawahan atau karyawan, maka pimpinan tersebut dapat mengawasi seluruh kegiatan perusahaan secara langsung. Dalam kondisi semacam ini internal kontrol dapat lebih terjamin, karena pimpinan dapat secara langsung mengawasi jalannya operasi perusahaan, tetapi jika perusahaan telah berkembang menjadi besar sehingga kegiatan dan jumlah pegawainya semakin bertambah, maka *space of control* menjadi luas, pimpinan tidak mungkin lagi dapat secara langsung mengawasi seluruh kegiatan yang terjadi dalam perusahaan. Pimpinan harus melimpahkan wewenang dan pengawasan kepada para manajer dibawahnya, dengan tanggungjawab perusahaan tetap berada di tangan pimpinan, sehingga pimpinan lebih dapat terkonsentrasi pada masalah-masalah perusahaan yang lebih strategis, guna pengembangan perusahaan dimasa mendatang.

Jika hal seperti itu yang terjadi, maka *space of control* dalam suatu perusahaan semakin lebar. Untuk mengantisipasi kondisi yang tidak terkontrol maka dibuat suatu media atau alat yang mampu menciptakan pengendalian internal perusahaan sehingga mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan. Struktur pengendalian intern adalah salah satu mediator yang dapat digunakan oleh pimpinan dalam mengantisipasi permasalahan tersebut. Dikatakan demikian karena, struktur pengendalian intern memiliki tujuan:

1. Mengamankan *assets* perusahaan.
2. Memberikan keyakinan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada pimpinan adalah benar.
3. Meningkatkan efisiensi kerja.
4. Memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan memang benar-benar telah dijalankan dengan baik.

Sebelum istilah struktur pengendalian intern ada, lebih dahulu istilah tersebut dikenal dengan istilah sistem pengendalian intern. Pengertian sistem pengendalian intern menurut *The Committee on Auditing Procedure of The American Institute*, yang diungkapkan oleh Gillespie (1995) adalah sebagai berikut: "Sistem pengendalian intern meliputi rencana organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan-kebijakan manajemen yang telah ditetapkan."

Pengertian sistem pengendalian intern tersebut di atas terus berkembang yang selanjutnya dikenal dengan istilah struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian intern ini mempunyai pengertian yang lebih luas, meliputi tiga unsur pokok (Bodnar and Hopwood, 1995) yaitu :

1. Lingkungan pengendalian
2. Sistem akuntansi
3. Prosedur pengendalian.

Oleh karena itu manajemen harus memperhatikan ketiga unsur dari struktur pengendalian intern tersebut dalam penerapannya didalam perusahaan .

### 2.1.1. Pengertian pajak

Dilihat dari kajian sejarah, pajak telah ada sejak zaman dahulu kala, dimana saat itu belum dinamakan pajak, namun lebih familier dengan sebutan upeti. Pada saat itu pelaksanaannya dipaksakan (diwajibkan) oleh para penguasa (Rajanya) secara sepihak kepada rakyatnya. Pertimbangan demikian dipandang realistis karena hasil pungutan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai rumah tangga negara, misalnya untuk mempertahankan diri. Pembayaran upeti ini lebih kentara lagi saat diberlakukan bagi negara yang dikalahkan (ditaklukan) dalam peperangan (negara taklukan).

Dalam perkembangan selanjutnya, baik dikalangan akademis maupun kalangan lain, memberikan definisi secara berbeda-beda walaupun pada dasarnya memiliki substansi yang sama dan tujuan yang sama. Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam buku "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" (Santoso, 1991:2), mendefinisikan:

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Edwin Robert Anderson Seligman dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pajak Internasional Indonesia: Perkembangan dan Pengaruhnya" (Rochmat Sumitro, 1986:2) memberikan definisi:

*A tax compulsory contribution from person to the government defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred".*

Sedang Smeets dalam bukunya "De Economische Betekenis der Belastingen" yang diikutip oleh Santoso (1991:4) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

*“Belastingen zijn aan de overheid (volgen nomen) verchuligde, afdwingbare pretties, zonder dat heirtegeover, in het individuele geval, aanwijsbare tegen pretties staan; zij strekken tot dekking van publicke uitgaven”*

yang berarti bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Rachmat Sumitro (1988, 12-13) mengemukakan tentang definisi pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang (tatbestan) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan sebagai alat (rutin dan pembangunan) dan yang dapat digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan.”

Berdasarkan definisi-definisi pajak tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa pajak memiliki beberapa karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.

Dalam kaidah ini memuat substansi, bahwa pajak dapat dipaksakan kepada wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak, bila wajib pajak melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, maka pemerintah dalam hal ini adalah instansi perpajakan dapat melakukan tindakan sanksi kepada pihak yang melanggar. Hal ini memungkinkan karena pajak berlaku atas dasar undang-undang yang disahkan oleh pemerintah. Namun demikian dalam kaitannya sikap keadilan dan peran serta masyarakat selaku wajib pajak, pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dalam penetapan ketentuan perpajakan dalam undang-

undang perpajakan, yakni harus memperoleh persetujuan masyarakat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil rakyat.

2. Pajak dapat dipungut secara paksa.

Seperti yang telah disebutkan dimuka, bahwa pajak dalam pelaksanaannya didasarkan dengan undang-undang. Sedang undang-undang disahkan pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat selaku perwakilan rakyat. Untuk itu maka perpajakan memiliki daya paksa, dan bagi yang melanggarnya akan memperoleh sanksi, karena pajak didasarkan atas undang-undang. Hal ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994.

3. Tidak ada kontra prestasi secara langsung.

Hasil pungutan akan digunakan pemerintah untuk pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, maksudnya untuk kepentingan umum. Karena pajak untuk kepentingan umum maka bagi wajib pajak yang telah membayar pajak tidak akan memperoleh kontra prestasi secara langsung

4. Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Bahwa hasil dari pungutan pajak oleh pemerintah akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang akan dimanfaatkan masyarakat secara umum.

5. Dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah.

Sesuai dengan jenis pajak bahwa pajak terdiri dari pajak pusat juga pajak daerah, maka sistem pemungutan pajak terdiri atas: (1) pajak yang nantinya akan disetorkan ke pemerintah pusat (1) pajak yang dipungut dan digunakan untuk pemerintah daerah. Terlebih dalam suasana otonomi daerah pajak daerah ini

sangat dibutuhkan, karena merupakan sumber pendapatan asli daerah. Dalam penelitian kali ini jenis pajak daerah yang berupa pajak perhotelan merupakan sentralisasi topik yang sedang diteliti.

6. Dapat berfungsi secara *budgetair* dan fungsi *regulerend*

Fungsi *budgetair* maksudnya bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sementara fungsi *regulerend* maksudnya pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.1.2. Pengertian Pajak Perhotelan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat II No. 3 Tahun 1998 Tentang Pajak dijelaskan bahwa:

a. Daerah

Daerah yang dimaksud disini adalah Daerah Tingkat II Kota Semarang. Sesuai dengan kaidah otonomi daerah, pemerintah daerah hendaknya mampu mengembangkan sumber pendanaan asli daerah, sebagai wujud kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan daerah. Dalam kaitannya topik yang sedang diteliti yaitu pajak hotel sehingga pembahasan dalam penelitian lebih terkonsentrasi pada pajak hotel.

b. Hotel

Sementara yang dimaksud dengan hotel adalah bangunan yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap, istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu,

dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

c. Pajak Hotel dan Restoran

Yaitu pungutan Daerah atas pelayanan hotel dan restoran.

Dalam kaitannya pelaksanaan pajak hotel yang merupakan bentuk pajak daerah, maka untuk penyelenggaraan pajak jenis ini dilakukan prosedur pelaksanaan termasuk administrasi yang mendukung pelaksanaan perpajakan. Untuk pelaksanaan perpajakan ditetapkan instrumen perpajakan antara lain:

a. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)

Adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

b. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)

Merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

c. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)

Merupakan surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

d. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)

Adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

e. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)

Adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

f. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)

Merupakan surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

g. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)

Merupakan surat yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

h. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah)

Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

### **2.1.3. Subjek dan Wajib Pajak**

Berdasar Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel dan Restoran menyatakan:

- a. Subyek Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan atau restoran
- b. Wajib Pajak adalah pengusaha hotel dan atau restoran.

#### 2.1.4. Objek Pajak

Yang dimaksud dengan objek pajak hotel atau restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran.

Sementara jenis-jenis objek pajak sesuai yang dimaksud dari definisi tersebut diatas adalah:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum.
- d. Jasa persewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel
- e. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapan.

Hal-hal yang dikecualikan dari Objek Pajak, antara lain:

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

- f. Pelayanan usaha jasa boga/katering
- g. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredaran tidak melebihi Rp. 8000.000 per tahun.

## **2.2. Struktur Pengendalian Intern**

Bertolak dari kaidah struktur pengendalian intern, sangat penting bagi perusahaan, karena faktor ini sangat berpengaruh terhadap keandalan dan keakuratan laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan yang akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk itu bagi perusahaan yang memiliki struktur pengendalian intern yang baik umumnya mampu menciptakan praktek manajemen yang sehat.

### **2.2.1. Pengertian Struktur Pengendalian Intern**

Struktur pengendalian manajemen diambil dari istilah "*internal control structure*". Setelah istilah tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, menimbulkan banyak perbedaan pengertian walaupun memiliki substansi yang sama. Di satu sisi menyebutkan "struktur pengawasan intern", disisi lain diartikan sebagai "struktur pengendalian intern". Dalam penulisan tesis kali ini digunakan istilah "struktur pengendalian intern".

Menurut Bodnar (1980: 60) memberikan definisi sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

*"system of internal control encompasses those policies, practice, and procedure employed by an organization to: (1) safeguard its assets against waste, fraud, and the in efficiency; (2) provide for accurate accounting and he operating information; (3) measure compliance with policy; and (4) the efficiency of operation"*.

Meigs dan Meigs (1987: 187) mengemukakan definisi sistem pengendalian intern sebagai berikut:

*"A system of internal control includes all the measures taken by an organization for purpose of: (1) protecting its resources against waste, fraud, an inefficiency; (2) ensuring accuracy and reliability in accounting, and operating data; (3) securing compliance with company policies; and (4) evaluating the level of performance in all divisions the company".*

Salamon (1985: 141) mengemukakan tentang definisi sistem pengendalian intern, sebagai berikut:

*"An entity's internal control include all the procedures and action taken by an organization to : (1) protected assets theft and waste; (2) ensure compliance with company policies and federal law; (3) evaluate the performance of personal in all parts and the company to promote efficiency of ooperations: and (4) ensure accurate and reliability operating data and accounting report".*

Selanjutnya pada tahun 1989, istilah sistem pengawasan intern berkembang berubah dari struktur pengawasan intern menjadi "struktur pengendalian intern". Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Kell dalam bukunya Modern Auditing (1989: 143) sebagai berikut:

*" an entity's internal control structure consits of the policies snd procedures establishd to provide reasonable assurance spesific entity objective will be achieved.*

*An entity's internal control structure consits of three elements : (1) the internal enviroment; (2) the accounting system; and (3) control procedures".*

Menurut Arens (1992 : 283) menjelaskan tentang struktur pengendalian intern sebagai berikut:

*"the system consits of many spesific policies and procedures designed to provide management with reasonable assurance that the goals and objective it believe important to the entity will be meet. These policies and procedures are after called controls, collectively they comprise the entity's internal control structure".*

Pada gilirannya struktur pengendalian intern ini digunakan banyak literatur, termasuk dalam penelitian ini juga menggunakan istilah tersebut.

### **2.2.2. Fungsi Struktur Pengendalian Intern**

Tujuan diadakan struktur pengendalian intern ialah untuk mengeliminir adanya kecurangan dalam perusahaan disamping tujuan lain yang memiliki implikasi terciptanya internal control yang baik. Menurut Arens (1992: 283-284), fungsi struktur pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Memberikan data yang dapat dipercaya dan diandalkan
2. Mengamankan harta dan catatan perusahaan
3. Mendorong efisiensi operasional perusahaan
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

### **2.2.3. Unsur-unsur Struktur Pengendalian Intern**

Sesuai dengan definisi struktur pengendalian intern diatas, terangkum unsur-unsur struktur pengendalian intern, sebagai berikut: (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Sistem Akuntansi; (3) Prosedur Pengendalian. Dimana masing-masing unsur tersebut dalam penelitian kali ini dimasukkan dalam variabel independen.

#### **2.2.3.1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian merupakan pengaruh gabungan dari berbagai faktor dalam membentuk memperkuat, atau memperlemah efektifitas kebijakan dan

prosedur tertentu. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (1994:319.4) (Bodnar and Hopwood, 1995) faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:

a. Falsafah manajemen dan gaya usaha

Adalah seperangkat keyakinan dasar (basic beliefs) yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawan. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh perusahaan. Filosofi memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan: (a) mengapa perusahaan dalam bisnis; (b) bagaimana perusahaan melakukan bisnis; (3) apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan dalam bisnis perusahaan.

Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu kesatuan usaha harus dilakukan. Ada manajer yang memilih gaya operasi yang sangat menekankan pentingnya pelaporan, penyusunan anggaran sebagai alat pengukur kinerja, dan lain-lain.

b. Struktur organisasi satuan usaha

Struktur organisasi ini dibentuk untuk tujuan mengatur kerja dalam organisasi yang didalamnya terdiri dari orang-orang sebagai pelaku yang terbagi atas beberapa jenjang atau level bagian. Untuk itu perlu dibuat struktur oirganisasi yang mengatur hak, tanggungjawab dan wewenang, yang akhirnya dilengkapi dengan *job diskription* yang jelas. Semakin efektif struktur organisasi ini, maka akan semakin baik pelaksanaan tugas serta pengawasan mudah dilakukan. Hal

ini didasarkan pada munculnya tanggungjawab yang jelas dimasing-masing level.

c. Berfungsinya dewan komisaris dan komite-komite yang terbentuk

Dewan komisaris adalah merupakan wakil dari para pemegang saham dalam perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Dewan komisaris ini berfungsi mengawasi pengelola perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dengan demikian apabila dewan komisaris aktif dalam menjalankan fungsinya besar kemungkinan dapat mencegah konsentrasi pengendalian ditangan direksi.

Jika dewan komisaris lebih didominasi oleh jajaran direksi, maka hubungan antara akuntan publik dengan dewan komisaris nyaris tidak ada artinya. Oleh karena itu dewan komisaris yang dipilih terdiri dari pihak luar akan memberi kontribusi efektif dalam pengawasan dan peran dewan komisaris akan dapat menghasilkan pemeriksaan yang andal.

d. Metode pemberian wewenang dan tanggungjawab

Kaidah ini sangat tepat jika dikaitkan unsur kepercayaan terhadap pihak bawahan. Struktur organisasi yang ada pada perusahaan memiliki implikasi terhadap, tanggungjawab, wewenang, serta konsekuensi lain yang melekat diberbagai jenjang manajemen. Komposisi ini harus dipertimbangkan terlebih dulu sebelum ditetapkan oleh direksi lewat persetujuan para pemegang saham yang dalam hal ini diwakili dewan komisaris. Karena hampir setiap garis yang ada pada struktur organisasi menimbulkan konsekwensi. Bagi manajemen yang sehat penyerahan wewenang dan tanggung jawab juga harus diikuti job

diskripsi yang jelas pula. Sehingga memunculkan garis komando yang proporsional dengan tidak tumpang tindih.

- e. Metode pengendalian manajemen dalam memantau dan menindaklanjuti kinerja termasuk audit intern,
- f. Kebijakan dan praktisi personalia,

Unsur ini berkaitan dengan praktek yang sehat, artinya sebuah manajemen sebaik apapun sistem pengendalian manajemen tanpa didukung oleh personel yang jujur nyaris tidak apa apa-apanya. Artinya setiap sistem yang dibangun manajemen sebaik apapun masih mengandung kelemahan. Bahkan walaupun sebuah *design* sistem kurang baik, tetapi jika didukung personel pelaksana yang jujur, tujuan perusahaan masih dapat tercapai dan kebocoran masih dapat dihindarkan.

- g. Berbagai faktor ekstern yang mempengaruhi operasi dan praktek suatu usaha, seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh badan legislatif dan lembaga pemerintah.

Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran dan tidaknya dari dewan komisaris, manajemen, pemilik dan pihak lain mengenai pentingnya pengendalian dan tekanannya pada suatu usaha yang bersangkutan.

#### **2.2.3.2. Sistem Akuntansi**

Sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, menghimpun, menganalisa, mengelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi satu usaha (perusahaan) dan untuk menyelenggarakan

pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban yang bersangkutan dengan transaksi tersebut. Menurut standar Profesional Akuntansi Publik (1994 :319.5) (Bodnar and Hopwood,1995) sistem akuntansi yang efektif mempertimbangkan pembuatan, metode dan catatan yang akan :

- a. mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah,
- b. menggambarkan transaksi secara tepat waktu dan rinci sehingga memungkinkan pengelompokan transaksi secara semestinya untuk pelaporan keuangan,
- c. mengukur nilai transaksi dengan cara yang memungkinkan pencatat nilai keuangan yang layak dalam laporan keuangan,
- d. menentukan periode terjadinya transaksi untuk memungkinkan pencatatan transaksi pada periode akuntansi yang semestinya,
- e. menyajikan dengan semestinya transaksi dan pengungkapannya dalam laporan keuangan .

### **2.2.3.3. Prosedur Pengendalian**

Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan terhadap lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang telah diciptakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan dicapai. Prosedur pengendalian dapat juga diintegrasikan dalam komponen tertentu lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi. Menurut standar Profesional akuntansi Publik (1994:319.6), (Bodnar and Hopwood, 1995) prosedur pengendalian dapat dikelompokkan ke dalam prosedur yang bersangkutan dengan :

- a. otorisasi yang semestinya atas transaksi dan kegiatan,
- b. pemisahan tugas yang mengurangi kesempatan yang memungkinkan seseorang dalam posisi yang dapat melakukan dan sekaligus menutupi kekeliruan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Oleh sebab itu tanggung jawab untuk memberikan otorisasi transaksi, mencatat transaksi, dan menyimpan aktiva perlu dipisahkan dengan karyawan yang berbeda,
- c. perancangan dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai untuk membantu secara semestinya transaksi dan peristiwa,
- d. pengamanan yang cukup atas akses dan penggunaan aktiva perusahaan dan catatan,
- e. pengecekan secara independen atas pelaksanaan dan penilaian yang semestinya atas jumlah yang dicatat.

### **2.3. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, “kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan” (Badudu dan Zain 1995: 1013). Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang dimaksud adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 1994 dengan diubahnya undang-undang perpajakan tersebut menjadi UU no .9 tahun 1994 , UU no

18 tahun 1997 sebagaimana diubah UU No 34 tahun 2000, maka sistem pemungutan di Indonesia adalah "*Self Assessment System*". Menurut Mardiasmo (1995:8), *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung memperhitungkan membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPD) secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Dalam kaitannya dalam akuntansi, maka kepatuhan wajib pajak mengandung pengertian seperti tersebut di atas.

Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh E. Eliyani (1989:29), "Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai masukan dan melaporkan pada waktunya. Informasi yang diperlukan adalah mengisi secara benar jumlah pajak yang terhutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak dipatuhi.

Pada lain pengertian tentang kepatuhan wajib pajak ini juga dikemukakan oleh D. Novak (1989 : 15) sebagai "... Suatu iklim kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU perpajakan,
2. Mengisi formulir pajak dengan benar,
4. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar, dan membayar pajak tepat waktunya".

Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyeter, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPD)

wajib pajak, berarti semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan mematuhi kewajiban pajaknya.

#### 2.4. Penelitian Sebelumnya

Kiryanto (1998) telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Pajak Penghasilannya “ pada 115 perusahaan manufaktur di Kodia Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan Struktur pengendalian Intern mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan dengan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban Pajak penghasilannya. Hasil penelitian ini mendukung tentang perlunya penilaian struktur pengendalian intern dalam setiap penugasan pemeriksaan dalam setiap perusahaan (norma pemeriksaan). Dalam hasil ini juga mengindikasikan, bahwa bagi perusahaan yang struktur pengendalian intern-nya memadai, sudah barang tentu patuh pada sistem dan prosedur yang telah dibakukan perusahaan, untuk itu dalam kaitan pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak, juga akan dilakukan dengan benar, karena sesuai dengan kaidah *internal control* yang berlaku bagi manajemen.

Suharto ( 1995 ) juga telah melakukan penelitian tentang “Hubungan Laporan Audit Akuntan Publik dalam Surat Pemberitahuan ( SPT ) Pajak dengan Keputusan Tindakan Pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan ( SPT ) pajak yang dilampiri laporan audit akuntan publik, kecil kemungkinannya dilakukan tindakan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ). Hasil sesuai dengan kaidah bahwa, auditor disamping

mengaudit laporan keuangan juga melihat seberapa baik *internal control* perusahaan, karena hal itu berimplikasi pada seberapa luas ruang lingkup audit. Dengan demikian bahwa perusahaan yang laporan keuangannya diaudit, berarti telah mencerminkan *internal control*, karena *internal control* juga menjadi bagian dari analisis auditor dalam penugasan audit perusahaan.

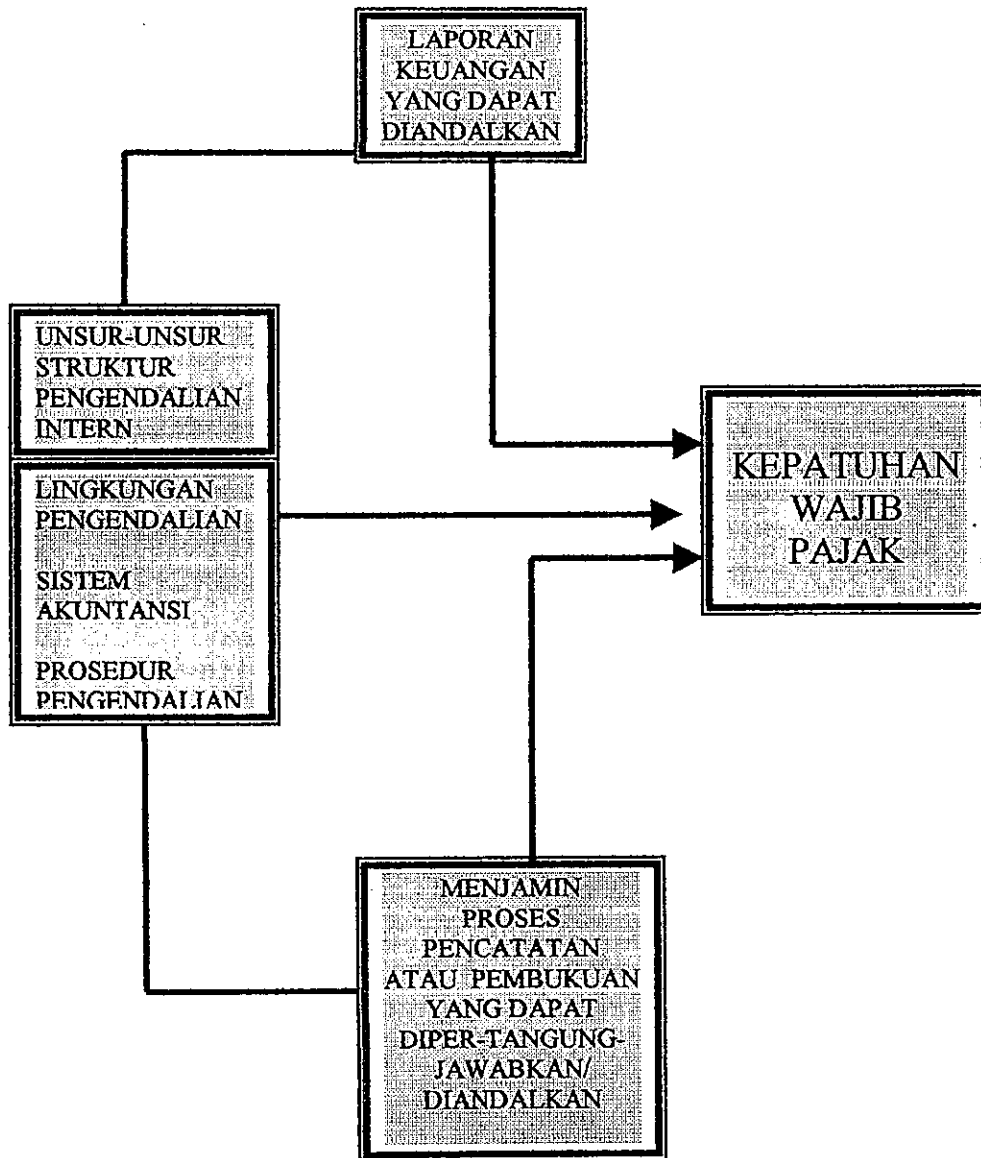
Agus Budiartanto (1999) merekomendasikan Kepatuhan WP setelah reformasi memiliki tingkat kepatuhan tinggi dibandingkan sebelum reformasi. Hasil ini didukung oleh kondisi dilapangan bahwa wajib pajak dituntut untuk transparan baik dalam pembukuan maupun dalam hal lain. Kondisi mendukung mereka untuk terbuka dan sadar akan perpajakan.

Solich Jamin (2001) merekomendasikan Kepatuhan wajib pajak selama krisis ekonomi tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi. Hasil ini sesuai dengan kondisi dilapangan bahwa dalam masa reformasi setiap instansi pemerintah dituntut kinerjanya baik, transparan termasuk instansi perpajakan, dalam rangka menggenjot pendapatan dari perpajakan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah, untuk itu instansi ini harus lebih intensif dalam mengadakan pengawasan pada setiap wajib pajak (WP). Hal ini berimplikasi pada setiap wajib pajak (WP) melakukan perbaikan kepatuhan perpajakan untuk menghindari koreksi pajak atau bentuk sanksi perpajakan lain.

## 2.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

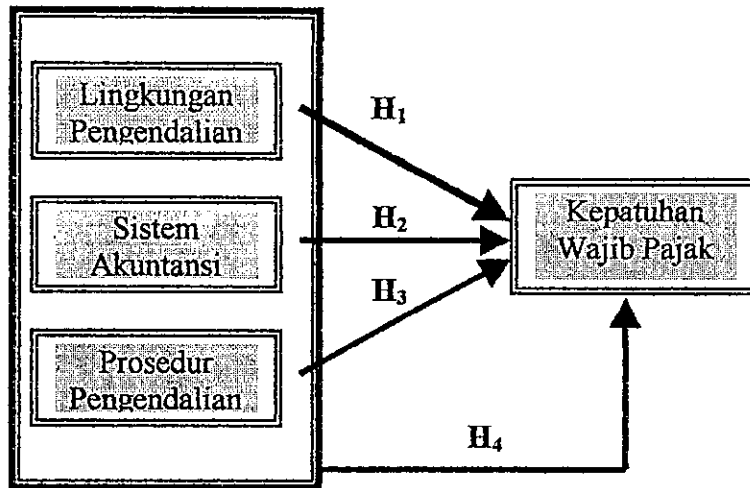
Didepan telah disebutkan bahwa struktur pengendalian intern mempunyai pengaruh terhadap ketepatan dan keakuratan dalam proses pengolahan data akuntansi yang diharapkan akan mendorong terciptanya ketepatan dalam penyusunan laporan keuangan yang merupakan bukti pendukung dalam perpajakan, terutama laporan laba-rugi yang merupakan dasar perhitungan pajak. Disamping itu dalam struktur pengendalian intern mendukung terciptanya kondisi yang mentaati sistem dan prosedur manajemen, sehingga memungkinkan dalam mentaati perpajakan bagi wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan lewat penciptaan lingkungan pengendalian perusahaan yang diejawantahkan dalam *internal control* yang baik oleh perusahaan. Dengan kata lain, secara teoritis dapat disimpulkan bahwa tingkat validitas internal kontrol yang diberlakukan perusahaan akan mendorong wajib pajak melakukan kepatuhan dalam perpajakan. Secara diagramatis, kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan (lihat gambar 1.1 dan 1.2) sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



Berdasarkan alur pemikiran teoritis yang dibangun seperti pada gambar 2.1 diatas, maka selanjutnya untuk mengembangkan hipotesis penelitian ini, dikembangkan model penelitian, seperti pada gambar 2.2 , dibawah ini:

**Gambar .2.2**  
**Pengaruh Antara**  
**Variabel Independen Dengan Variabel Dependen**



## 2.6. Hipotesis

Oleh karena Hipotesis itu merupakan suatu anggapan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya, di mana anggapan sementara adalah Penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dalam memenuhi kewajiban pajak hotelnya, maka berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang diketengahkan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> :Terdapat pengaruh antara penerapan lingkungan pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh antara sistem akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>3</sub> :Terdapat pengaruh antara prosedur pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>4</sub> : Terdapat pengaruh antara unsur-unsur struktur pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak

## **BAB. III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data primer yaitu peneliti melakukan survey kelapangan secara langsung, berupa penyebaran kuisisioner ke hotel-hotel yang dijadikan obyek penelitian. Disamping menggunakan data primer seperti tersebut diatas, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berupa pemanfaatan data yang tersedia di Dinas Pendapatan Daerah maupun instansi lain yang terkait yang mendukung proses pengambilan data penelitian ini. Hotel hotel yang dijadikan obyek ialah hotel-hotel yang ada di kota Semarang mulai tahun 1997 – 2000 yang banyaknya sekitar 46 hotel dari beberapa kelas.

#### **3.2. Populasi Data dan Sampel**

Populasi sasaran penelitian ini adalah semua hotel yang ada di Kota Semarang .Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Dinas Pariwisata Jawa Tengah, Hotel yang ada tercatat sejumlah 46 hotel. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan penyebaran kuesioner dan wawancara. Setelah data terkumpul seluruh populasi dimasukan dalam analisis. Dengan demikian sampel yang digunakan merupakan seluruh populasi berupa penarikan kuesioner yang telah disebar dengan ditambah wawancara koresponden untuk mepertajam analisis penelitian.

Populasi penelitian ini bersifat heterogen, dimana hotel - hotel tersebut oleh kantor Dinas Pariwisata dikelompokkan menjadi enam , yaitu:

**Tabel: 3.1**  
**Karakteristik Hotel Ditinjau Dari Kamar**

NO		Populasi	Karakteristik
1.	Jasmine Hotel/Hotel Melati	18	
2.	Star Hotel/Hotel Bintang *	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah minimum kamar standar 15 kamar</li> <li>➤ Dilengkapi kamar mandi didalam</li> <li>➤ Luas kamar 20m<sup>2</sup></li> </ul>
3.	Star Hotel/Hotel Bintang **	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah minimum kamar standar 20 kamar</li> <li>➤ Jumlah minimum kamar <i>suite</i> 1 kamar</li> <li>➤ Dilengkapi kamar mandi didalam</li> <li>➤ Luas minimum kamar 22m<sup>2</sup></li> <li>➤ Luas minimum kamar <i>suite</i> 44 m<sup>2</sup></li> </ul>
4.	Star Hotel/Hotel Bintang ***	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah minimum kamar standar 30 kamar</li> <li>➤ Jumlah minimum kamar <i>suite</i> 2 kamar</li> <li>➤ Dilengkapi kamar mandi didalam</li> <li>➤ Luas minimum kamar standar 24 m<sup>2</sup></li> <li>➤ Luas minimum kamar <i>suite</i> 48 m<sup>2</sup></li> </ul>
5.	Star Hotel/Hotel Bintang ****	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah minimum kamar standar 50 kamar</li> <li>➤ Jumlah minimum kamar <i>suite</i> 3 kamar</li> <li>➤ Dilengkapi kamar mandi didalam</li> <li>➤ Luas minimum kamar mand 24 m<sup>2</sup></li> <li>➤ Luasn minimum kamar <i>suite</i> 52 m<sup>2</sup></li> </ul>
6.	Star Hotel/Hotel Bintang *****	1	
	Jumlah	46	

Sumber : Kantor Dinas Pariwisata Jawa Tengah

Populasi hotel dikelompokkan dalam tiga strata yaitu: strata satu adalah hotel berbintang / Star Hotel (bintang dua keatas) , strata dua hotel bintang satu / star hotel

\* , strata tiga hotel Melati (Jasmine Hotel), adapun karakteristik hotel yang dijadikan objek penelitian terlihat pada tabel 3.1 diatas.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Sehubungan data yang dipergunakan dalam penelitian kali ini merupakan data primer dan data sekunder, maka teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. data primer diambil langsung lewat survey dilapangan (perusahaan). Peneliti langsung ke lapangan yaitu dengan cara wawancara pada obyek baik kepada para manager hotel maupun pada bagian akuntansi dan bagian lain yang dianggap kompeten untuk diambil informasinya.
2. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari buku-buku (text book), laporan dari kantor Dinas Pariwisata dan informasi dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA), serta karya-karya ilmiah yang dianggap menunjang dalam penelitian ini.

### **3.4. Operasional Variabel Penelitian**

Berdasarkan hipotesis penelitian yang telah diajukan, maka dalam penelitian ini terdapat empat variabel , yaitu tiga variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (tak bebas) . variabel-variabel independen (bebas) meliputi : Lingkungan Pengendalian ( $X_1$ ), Sistem Akuntansi ( $X_2$ ) , dan Prosedur Pengendalian ( $X_3$ ), sedangkan variabel dependennya (tak bebas) adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya ( $Y$ ).

### **3.4.1. Lingkungan Pengendalian ( $X_1$ )**

Variabel lingkungan pengendalian ( $X_1$ ) ini mempunyai indikator-indikator sebagai berikut :

- a. falsafah manajemen dan gaya operasi
- b. struktur organisasi
- c. berfungsinya dewan komisaris dan komite-komite pemeriksa
- d. metode pengendalian
- e. kebijakan dan prosedur
- f. kesadaran pengendalian
- g. faktor-faktor ekstern

### **3.4.2. Sistem Akuntansi ( $X_2$ )**

Variabel sistem akuntansi ( $X_2$ ) mempunyai indikator-indikator sebagai berikut:

- a. transaksi yang dicatat semua valid
- b. pencatatan transaksi secara tepat waktu dan cukup rinci
- c. transaksi yang terjadi dinilai secara layak
- d. periode transaksi secara tepat
- e. menyajikan transaksi dan mengungkapkan laporan

### 3.4.3. Prosedur Pengendalian ( $X_3$ )

Variabel prosedur pengendalian ( $X_3$ ) mempunyai indikator-indikator sebagai berikut :

- a. pemisahan tugas yang memadai
- b. prosedur otorisasi yang memadai
- c. perancangan dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai
- d. pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan
- e. pengecekan secara independen atas kinerja

### 3.4.4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel kepatuhan wajib pajak atau variabel dependen (Y) mempunyai indikator-indikator sebagai berikut :

- a. menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang
- b. membayar pajak yang terutang secara tepat waktu
- c. mengisi dan melaporkan pajak yang terutang ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu

Pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan rating *technique* dengan menggunakan *attitudinal item Likert*. Skor hasil pengukuran variabel-variabel ini mempunyai tingkat pengukuran ordinal, sedangkan alat analisisnya menghendaki tingkat pengukuran yang interval, maka tingkat pengukuran ini dinaikkan menjadi tingkat pengukuran interval melalui *Method of Successive Interval* (Hays, 1969 : 39).

Adapun langkah-langkah dalam *Method of Successive Interval* ini adalah :

1. Perhatikan setiap pernyataan (item), misalnya : item tertentu.
2. Untuk pernyataan tersebut, tentukan beberapa responden yang mendapat skor 1,2,3,4,5, disebut frekuensi (f).
3. Setiap frekuensi dibagi banyaknya responden, hasilnya disebut proporsi (p).
4. Jumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap responden sehingga diperoleh proporsi kumulatif (pk).
5. Dengan menggunakan tabel normal, hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh.
6. Tentukan nilai interval (*scale value*) untuk setiap nilai Z dengan rumus sebagai berikut :

$$SV = \frac{\text{Density at Lower Limit} - \text{Density at Upper Limit}}{\text{Area Under Upper Limit} - \text{Area Under Lower Limit}}$$

7. SV (*Scale Value*) yang nilai terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah menjadi sama dengan satu.

### 3.5. Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis dengan alat uji setatistik, yang terdiri atas:

#### 3.5.1. Statistik Diskriptif

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah dalam pemahaman data dan variabel yang digunakan dalam penelitian, maka data dan variabel penelitian dipaparkan dalam bentuk media gambat dan tabel. Maksud penggunaan media ini

diharapkan mempermudah dalam penyampian data dan pemahaman materi oleh para pembaca..

### 3.5.2. Uji Hipotesis Penelitian

Ho = Penerapan Struktur Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak hotel.

H1 = Penerapan Struktur Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak hotel.

#### Hipotesis Statistik:

Untuk menguji hipotesis, digunakan alat analisis regresi linier berganda, karena hipotesis kerja ini ingin mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$X_1$  = Lingkungan Pengendalian

$X_2$  = Sistem Akuntansi

$X_3$  = Prosedur Pengendalian

e = error

Sehubungan dengan pemakaian metode linier berganda (OLS), maka untuk menghindari asumsi klasik, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Model asumsi klasik tersebut adalah:

- *Multicollinearity* antar variabel independen. Metode untuk menguji adanya *multicollinearity* adalah *eigenvalues* dan *condition index*. Berdasarkan *eigenvalues number k* yang merupakan hasil pembagian *eigenvalues* maksimum dengan *eigenvalues* minimum diperoleh k antara 100 sampai 1000, berarti terjadi *strong multicollinearity* dan jika number k lebih dari 1000 berarti terjadi *resevere multicollinearity*. *Condition index* merupakan akar dari number k, jika *condition index* (CI) menemukan nilai antara 10 sampai 30 berarti terjadi *moderat strong multicollinearity*, bila nilai CI diatas 30 maka terjadi *multicollinearity* yang lebih besar (Gujarati, 1988)
- Heterocedastisitas, untuk mendeteksi adanya heterocedastisitas digunakan model Park test, caranya mendeteksi ialah  $\ln e^2$ . Pengujian park test melalui dua tahap prosedur yaitu: pertama dilakukan proses regresi OLS dengan tidak memandang heterocedastisitas, sehingga memperoleh  $e_i$ . Kedua melakukan regresi  $\ln e_i^2 = \ln e_i \sigma^2 + \beta \ln X_i$
- *Autocorrelation*, yaitu dengan menggunakan metode Durbin-Watson atau d test. Dalam metode ini menggunakan titik kritis yaitu batas atas  $d_u$  dan batas bawah  $d_l$ . Apabila nilai d yang dihitung berada diluar  $d_l$  atau diluar  $d_u$  berarti terdapat serial korelasi positif atau negatif (terjadi autokorelasi)

## **BAB. IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Responden**

Responden yang dijadikan obyek penelitian adalah manajer akuntansi dan asisten manajer akuntansi di hotel-hotel dari berbagai golongan kelas yang ada di kota Semarang. Dari data diperoleh bahwa hotel yang ada di kota Semarang terdapat 46 hotel dengan pembagian kelas dan jumlah perkelas sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.1 tersebut diatas. Namun ternyata setelah kuesioner dikirim ternyata yang kembali sejumlah 43 hotel, jadi terdapat 3 kuesioner yang tidak kembali.

Melihat hasil klasifikasi hotel dan struktur hotel yang ada di Semarang tersebut, masih sangat membutuhkan sentuhan, dimana Semarang yang memiliki potensi industri dan sekaligus memiliki potensi wisata hanya memiliki hotel Star 5 satu buah dan hanya didukung beberapa hotel yang memiliki kelas star. Hampir mayoritas hotel berada pada kelas melati, hal ini memiliki keharusan untuk dikembangkan, terutama dalam rangka otonomi daerah guna mendukung pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi.

Sesuai dengan kaidah otonomi daerah yang sedang dijalankan lewat kebijakan pemerintah setelah orde reformasi, hampir semua daerah berusaha memenuhi kebutuhan daerah masing-masing dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumbernya adalah pendapatan dari pajak perhotelan.

Penentuan obyek penelitian lewat hotel-hotel yang ada di Kota Semarang ini diharapkan dapat membantu Pemda setempat dalam penentuan kebijakan perpajakan perhotelan di Kota Semarang dan sekaligus dalam rangka pembinaan untuk pengembangan industri jenis ini di masa datang agar lebih maju.

Sementara apabila dilihat dari jenis dan tingkat pendidikan responden yang terlibat dalam penelitian ini terlihat pada tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Responden Penelitian

NO	Nama Hotel	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Metro Hotel ***	Head Accounting	Laki-laki	S-1 Akuntansi
2	Permata Hijau Hotel *	Kabag Adm	Perempuan	S-1 Akuntansi
3	Tanjung Mas (M <sup>3</sup> )	Accounting	Perempuan	SMEA
4	Rinjani Palace Hotel *	Kabag Account	Laki-laki	S-1 Akuntansi
5	Alam Indah Hotel	Kabag Pembukuan	Perempuan	S-1 Manajemen
6	Blambangan Hotel (M <sup>1</sup> )	Kabag Adm	Perempuan	S-1 Manajemen
7	Patra Jasa Hotel ****	GM	Laki-Laki	S-1 Manajemen
8	Elizabeth Palace (M <sup>2</sup> )	Kabag Operasional	Laki-Laki	S-1
9	Merbabu Hotel (M <sup>3</sup> )	GM	Laki-laki	S-1
10	Indrapasta Hotel (M <sup>3</sup> )	Akunting	Laki-laki	S-1 Akuntansi
11	Bukit Asri Hotel *	Kabag Akunting	Perempuan	S-1 Akuntansi
12	Puri Garden Hotel ***	Head Accounting	Laki-laki	S-1 Akuntansi
13	Metro Grand Park ***	Ass. GM	Laki-laki	S-1 Manajemen
14	Surya Hotel (M <sup>3</sup> )	GM	Perempuan	S-1
15	Plaza Hotel *	Kabag Akuntansi	Perempuan	S-1 Akuntansi
16	Plaza Hotel *	GM	Laki-laki	S-1
17	Nyata Plaza Hotel *	Kabag Akuntansi	Laki-laki	S-1 Akuntansi
18	Surya Hotel (M <sup>3</sup> )	Accounting	Laki-laki	S-1 Akuntansi
19	Candi Indah Hotel *	Kabag Umum	Laki-laki	S-1
20	Bali Hptel *	Kabag Akuntansi	Laki-laki	S-1 Akuntansi
21	Owirin Hotel *	Kabag Adm	Perempuan	S-1
22	Telomoyo Hotel *	Kabag Adm	Perempuan	S-1
23	Grasia Hotel **	Kabag Akuntansi	Perempuan	S-1 Akuntansi
24	Hotel Siliwangi *	GM	Laki-laki	S-2 MAP
25	Pendawa Inn (M <sup>1</sup> )	Kabag Adm	Perempuan	SMEA
26	Muria Hotel *	GM	Laki-laki	S-1
27	Mahkota Hotel (M <sup>3</sup> )	Kabag Umum & Opersional	Laki-laki	S-1
28	Hotel Siliwangi *	Kabag Akunting	Laki-laki	S-1 Akuntansi
29	Santika Hotel *	GM	Laki-laki	S-1
30	Sroodol Indah Hotel *	Kabag Akunting	Laki-laki	S-1 Akuntansi
31	Ciputra Hotel ****	Resident Manager	Laki-laki	S-1
32	Tugu Indah Hotel (M <sup>3</sup> )	Kabag Accounting	Perempuan	S-1 Akuntansi
33	Grand Candi Hotel *****	Accounting	Laki-laki	S-1 Akuntansi
34	Graha Santika ****	Head Accounting	Laki-laki	S-1 Akuntansi
35	Ciputra Hotel ****	Head Account	Perempuan	S-1 Akuntansi
36	Santika Hotel *	Kabag Akuntansi	Laki-laki	S-1 Akuntansi
37	Sriwijaya Hotel (M <sup>1</sup> )	Kabag Umum	Laki-laki	S-1
38	Djelita Hotel (M <sup>3</sup> )	GM	Laki-laki	S-1
39	Grand Rama Hotel *	GM	Laki-laki	S-1 Manajemen
40	Nendra Yekti Hotel (M <sup>3</sup> )	Manager Oper	Laki-laki	S-1
41	Java Hotel (M <sup>3</sup> )	Ass Mang Umum	Laki-laki	S-1
42	Grand Rama Hotel	Kabag Akunting	Perempuan	S-1 Akuntansi
43	Hotel Tanjung Mas (M <sup>3</sup> )	Manager OP	Laki-laki	S-1

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas, nampak bahwa jika diklasifikasikan menurut pendidikan dari responden yang terlibat dalam penelitian ini, seperti pada tabel 4.2, sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Klasifikasi responden  
Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	SLTA	2	4.65
2	Sarjana Strata Dua (S-2)	1	2.33
3	Sarjana Strata Satu (S-1)	40	93.20
Jumlah		43	100

*Sumber: data olahan statistik*

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa responden yang terlibat dalam penelitian sebagian besar berpendidikan sarjana strata satu yaitu sebesar 40 responden atau 0,932, sementara sarjana strata dua sebesar satu responden atau 0,023, dan berpendidikan SLTA sebesar dua responden atau 0,0465. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden dianggap representatif terhadap analisis penelitian seperti yang diharapkan, pendidikan sebagian besar adalah sarjana, yang diharapkan memiliki kemampuan dalam analisis struktur pengendalian intern dan pajak perhotelan.

## 4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sehubungan dengan dalam penelitian kali ini menggunakan data primer, yaitu lewat penyebaran kuesioner, maka untuk menjaga validitas dan reabilitas instrumen, setelah kuesioner diterima dan selanjutnya dikakukan pengkodean, setelah pengkodean selesai kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas data. Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen adalah sebagai berikut:

Instrumen yang mengukur lingkungan pengendalian diuji validitas dan reliabilitas, dimana hasilnya ditunjukkan dalam tabel 4.3. sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Hasil uji validitas dan reliabilitas data  
Instrumen Lingkungan Pengendalian

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE ALPHA)				
Item - total Statistics				
	Scale mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item Total Correlation	Alpha if Item Deleted
VAR00001	27,9535	17,4740	,4446	,6210
VAR00002	27,7907	16,7885	,4623	,6133
VAR00003	28,2326	17,8494	,2423	,6637
VAR00004	27,8837	16,2481	,4507	,6130
VAR00005	28,4186	16,5825	,3521	,6384
VAR00006	28,3721	18,7630	,2067	,6666
VAR00007	28,2093	17,3123	,4284	,6240
VAR00008	28,0233	19,4042	,1340	,6797
VAR00009	28,1395	17,2658	,4048	,6262
Reliability Coefficients				
N of Cases = 43,0		N of Item = 9		
Alpha = ,6663				

Sumber: data sekunder diolah

Uji validitas instrumen lingkungan pengendalian menghasilkan angka r hitung masing-masing item positif ( lihat tabel 4.3) diatas r tabel pada alfa 5% yang menunjukkan angka 0,248, ini berarti reliabel, kecuali pada butir 3, 6 dan 8 yang nilainya dibawah nilai r tabel yaitu angka 0.2423 untuk item 3, 0.2067 untuk item 6

dan 0,1340 untuk item 8. Untuk uji validitas menunjukkan bahwa item-item ini sudah valid, hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan yang menghasilkan nilai alpha positif 0,6663 yang diatas r tabel sebesar 0,248 ( $0,6663 > 0,248$ ), (lihat tabel 4.3).

Variabel independen ke dua yaitu sistem akuntansi, Uji validitas dan reliabilitas dari instrumen yang mengukur variabel ini terlihat dalam tabel 4.4. sebagai berikut:

Tabel:4.4  
Hasil uji validitas dan reliabilitas  
Instrumen Sistem Akuntansi

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE ALPHA)				
Item – total Statistics				
	Scale mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item Total Correlation	Alpha if Item Deleted
VAR00001	31,5349	15,0642	,3352	,6293
VAR00002	31,3721	16,0487	,1985	,6641
VAR00003	31,2791	17,1107	,1303	,6717
VAR00004	31,1395	16,4086	,3711	,6262
VAR00005	30,7907	15,4075	,5102	,5989
VAR00006	30,5581	14,4430	,4389	,6025
VAR00007	30,4651	15,6357	,4307	,6117
VAR00008	30,7907	13,7409	,4293	,6042
VAR00009	30,5814	16,4396	,2598	,6441
Reliability Coefficients				
N of Cases = 43,0		N of Item = 9		
Alpha = ,6563				

Sumber: data sekunder diolah

Uji reliabilitas instrumen sisitem akuntansi menghasilkan r hitung di masing-masing item positif diatas r tabel pada alfa 5% yaitu dengan nilai 0,248, ini berarti reliabel, kecuali pada item 2 dan 3 yang menunjukkan r hitung sebesar 0,1985 untuk item satu dan 0,1303 untuk item dua. Sementara uji validitas data menunjukkan kondisi valid, hal ini didasarkan hasil perhitungan yang mngindikasikan hasil alpha hitung sebesar 0,6563 yang diatas nilai r tabel sebesar 0,248 ( $0,6563 > 0,248$ ), (lihat tabel 4.4).

Uji validitas dan reliabilitas instrumen yang mengukur variabel independen yang ketiga yaitu prosedur pengendalian, ditunjukkan pada tabel 4.5, sebagai berikut:

Tabel: 4.5  
Hasil uji validitas dan reliabilitas  
Instrumen Prosedur Pengendalian

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE ALPHA)				
Item - total Statistics				
	Scale mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item Total Correlation	Alpha if Item Deleted
VAR00001	31,6512	14,9668	,6027	,7969
VAR00002	30,9302	14,9236	,6148	,7954
VAR00003	31,2558	14,8616	,5366	,8060
VAR00004	31,2791	13,5869	,7444	,7761
VAR00005	31,4419	15,7287	,4703	,8132
VAR00006	31,4419	16,1096	,5625	,8041
VAR00007	31,4651	15,9690	,4753	,8121
VAR00008	30,8605	16,9801	,3903	,8203
VAR00009	31,1628	17,1395	,3332	,8257
Reliability Coefficients				
N of Cases = 43,0		N of Item = 9		
Alpha = ,8242				

Sumber: data sekunder diolah

Uji reliabilitas instrumen Prosedur pengendalian menghasilkan r hitung di masing-masing item positif yang diatas r tabel pada tingkat alfa 5% yaitu sebesar 0,248, hasil ini menunjukkan reliabel. Sementara perhitungan Validitas menunjukkan hasil yang valid. Hal ini didasarkan pada nilai alpha hitung diatas r tabel yaitu  $0,8242 > 0,248$ . (lihat tabel 4.4)

Uji validitas dan reliabilitas instrumen yang mengukur variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan, terlihat pada tabel 4.6, sebagai berikut:

Tabel: 4.6  
 Hasil uji validitas dan reliabilitas  
 Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak  
 Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE ALPHA)				
Item – total Statistics				
	Scale mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item Total Correlation	Alpha if Item Deleted
VAR00001	46,9767	45,0233	,2736	,7580
VAR00002	46,7907	45,0742	,3000	,7554
VAR00003	47,2326	44,4684	,3101	,7548
VAR00004	46,7907	45,5028	,2216	,7630
VAR00005	46,9535	45,9025	,1871	,7663
VAR00006	47,0465	40,8549	,5119	,7339
VAR00007	47,1395	42,2182	,4338	,7426
VAR00008	47,2093	40,7409	,5249	,7325
VAR00009	47,2791	43,2060	,3789	,7483
VAR000010	46,5116	45,3987	,2619	,7587
VAR000011	46,6279	40,5249	,6624	,7216,
VAR000012	46,9767	42,4994	,5399	,7350
	47,0930	40,5626	,5083	,7339
VAR000013	46,9302	45,7331	,1648	,7706
Reliability Coefficients				
N of Cases = 43,0		N of Item = 9		
Alpha = ,7625				

Sumber: data sekunder diolah

Uji validitas dan reliabilitas instrumen variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil r hitung positif diatas r tabel pada alfa 5% yaitu 0,248, sementara alpha hitungnya menghasilkan 0,7625 diatas r tabel 0,248 ( $0,7625 > 0,248$ ), kecuali untuk item 4 yang menunjukkan hasil 0,2216, item 5 yang menunjukkan hasil 0,1871 dan item 14 yang menunjukkan hasil 0,1648.

### 4.3. Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1. Uji multicollinearitas

Untuk mengetahui model baik secara statistik, maka harus dipenuhi pengujian asumsi klasik yang merupakan gangguan dalam analisis yang menggunakan alat uji

statistik dengan *ordinary linier regression* (OLS), baik yang berupa *multicollinearity*, *heterocedasticity*, maupun *autocorrelation*.

Asumsi klasik yang pertama multicoillinearity dideteksi dengan metode korelasi berpasangan antar regressor, seperti yang tercantum dalam tabel 4.7. dibawah ini:

Tabel: 4.7  
Multicollinearitas

Correlation Coefficients				
	X1	X2	X3	Y
X1	1,000 (43) P=,	-,1938 (43) P=,213	,2462 (43) P=,111	,0300 (43) P=,849
X2	-,1938 (43) P=,213	1,0000 (43) P=,	-,0360 (43) P=,819	,5449 (43) P=,000
X3	,2462 (43) P=,111	-,0360 (43) P=,819	1,0000 (43) P=,	-,2634 (43) P=,088
Y	,0300 (43) P=,849	,5449 (43) P=,000	-,2634 (43) P=,038	1,0000 (43) P=,
(Coefficient/(case) / 2-tailed signifikan)				

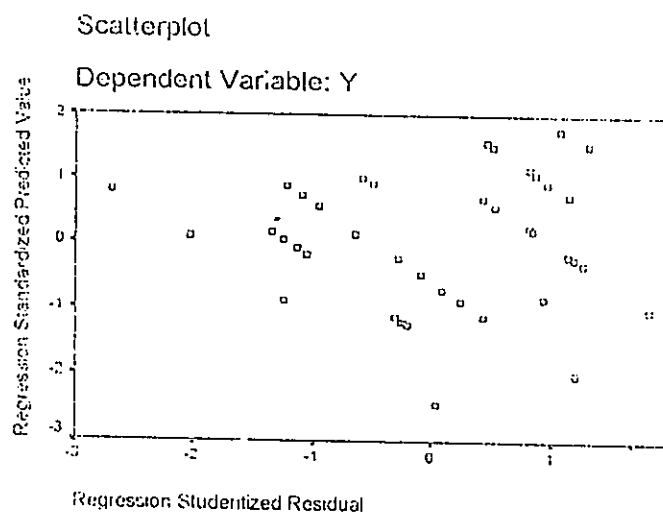
Sumber: data sekunder diolah

Dari perhitungan korelasi antar variabel seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.7 tersebut diatas menunjukkan tidak terdapat multikollinearitas antar variabel penelitian. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya koefisien korelasi antar variabel yang secara keseluruhan dibawah 5% (p valiu < alpha 5%), (Gunawan Sumodiningrat, 1998)

### 4.3.2. Uji Heterocedastisitas

Asumsi klasik yang kedua adalah heterocedastisitas, untuk mengetahui tidak adanya heterocedastisitas, ditunjukkan hasil analisis dengan menggunakan *Scatterplot*, dibawah ini:

Gambar 4.1  
Scatterplot



Dari *Scatterplot*, mengindikasikan tidak terjadinya *heterocedasticity*, hal ini ditunjukkan dengan penyebaran titik-titik tidak membentuk suatu pola tertentu, melainkan titik-titik dalam *scatterplot* menyebar disekitar angka nol (0), (Singgih Santoso, 2000).

### 4.3.3. Uji Autocorrelation

Asumsi klasik yang terakhir adalah *autocorrelation*, untuk mengetahui bahwa model ini bebas dari gangguan asumsi klasik aoutokorelasi digunakan Durbin-

Watson test. Angka angka yang digunakan dalam metode tersebut adalah  $d$ ,  $d_1$ , dan  $d_u$ . Hasil dari perhitungan tersebut dapat menunjukkan nilai  $d$  sebesar 1,99257,  $d_1$  sebesar 1,38 dan  $d_u$  sebesar 1,67 (tabel d) pada alfa 5%. Karena nilai DW sebesar 1,99257 lebih besar dari  $d_u$  sebesar 1,67 maka tidak terjadi autokorelasi (Imam Ghozali, 2001)

#### 4.4. Hasil Analisis Regresi

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Penggunaan alat uji ini karena akan menguji pengaruh beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam perlakuan analisis penelitian kali ini dilakukan dua tahap pengujian yaitu pada pengujian pertama dan kemudian dilakukan pengujian yang kedua yang ternyata menghasilkan model yang relatif lebih baik, karena hampir semua nilai  $t$  yang merupakan alat uji individual memperoleh hasil kurang dari 0,05 yang berarti secara individual masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. (Singgih Santoso, 2001). Adapun hasil analisis regresi yang dibantu dengan program SPSS versi 6.0 terlihat pada tabel 4.9. sebagai berikut.

Berdasarkan hasil yang ditampilkan lewat tabel 4.9 nampak jelas bahwa,  $R$  yang diperoleh sebesar 0,63084 cukup tinggi yaitu masih berada diatas 0,5 (Singgih Santoso, 2001). Dengan demikian model ini layak untuk dilakukan pengujian lebih lanjut, karena kemungkinan kuat variabel independen memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel dependen-nya.

Hasil regresi juga menunjukkan angka  $R^2$  sebesar 0,39795 kondisi ini mengindikasikan bahwa 0,39795 model ini dapat dijelaskan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. Namun berhubung dalam model ini variabel independen yang digunakan lebih dari dua maka menggunakan Adjusted R Square yang menunjukkan hasil 0,39795, hal ini berarti bahwa variasi dari kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya sebesar 0,39795, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terkafer dalam model ini (lihat tabel 4.9).

*Standard Error Of Estimate*, menunjukan hasil sebesar 1,40441 yang berarti bahwa, model ini memiliki tingkat kesalahan 1,40441. Dalam suatu model semakin kecil *Standard Error of Estimate* semakin baik model yang dihasilkan (lihat tabel 4.9)

#### **4.5. Uji Hipotesis**

Hipotesis penelitian ini diuji dengan regresi linier berganda dimana sebuah variabel dependen dengan lima variabel independen. Hasil analisis ini disajikan tabel 4.8. dan 4.9.

Signifikansi model memberikan dasar untuk menerima dan menolak hipotesis penelitian. Kesimpulan mengenai hipotesis setiap variabel independen dinyatakan dengan tanda positif atau negatif dan signifikansi dengan koefisien variabel yang bersangkutan.

Tabel: 4.8  
 Hasil  
 ANOVA

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	50,84545	3	16,94848	8,59300	,0002
Residual	76,92199	39	1,97236		

*Sumber: data primer diolah*

Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yang dimasukkan dalam model yaitu, Sistem Akuntansi, Prosedur Pengendalian dan Lingkungan pengendalian secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak. Kondisi ini dapat dilihat tingkat signifikan F hitung yang diperoleh sebesar 8,59300 dengan tingkat signifikansi 0,0002 pada tingkat 5%. Dengan diperolehnya tingkat signifikan F tersebut berarti model dapat dilanjutkan dengan uji individual atau uji t.

Dengan hasil analisis regresi yang menunjukkan F hitung 8,59300 pada signifikansi 0,002, berarti dalam penelitian ini menolak hipotesis nol dan tidak mampu menolak hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa:

**H4: Terdapat pengaruh antara, lingkungan pengendalian, Sistem akuntansi dan prosedur pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.**

Terdapat dua variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakan pada tingkat alfa 5% yaitu: (1) Sistem akuntansi, berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda memperoleh nilai t hitung 1,641; (2) prosedur pengendalian dengan t hitung 2,305. Sedang jika menggunakan tingkat alfa 15% tiga variabel signifikan yaitu Lingkungan

pengendalian, sistem akuntansi dan perosedur pengendalian. Atas dasar hasil regresi linier berganda tersebut, dapat diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 10,618856_{\text{konstanta}} + 0,151369 X_1 + 0,866078 X_2 + 0,408786X_3 + e$$

Untuk mengetahui seberapa tingkat pengaruh masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji *partial* atau uji t. Hasil perhitungan regresi berganda secara *partial* dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel: 4.9  
Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std B	Beta		
Konstanta	10,618856	2,8077812			,0005
X <sub>1</sub>	,151369	,092252	,214282	1,641	1,089
X <sub>2</sub>	,866078	,190523	,575754	4,546	,0001
X <sub>3</sub>	,408786	,177377	,3295456	2,305	,0266
R	0,63084				
R Square	0,9795				
Adjusted R Square	0,35164				
Std Error of Estimate	1,40441				

Sumber: Data primer diolah

Hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini menyatakan:

**H 1: Terdapat pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dalam memenuhi kewajiban pajak.**

Hasil perhitungan menunjukkan nilai t signifikan dibawah alfa 0,05 yaitu 1,641 dan tingkat signifikansi (p value) sebesar 1,089. Ini berarti lingkungan pengendalian memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

melakukan kewajiban perpajakan. Dengan hasil ini maka hipotesis nol ditolak, dan tidak sanggup menolak hipotesis alternatif.

Hipotesis alternatif kedua yang diuji dalam penelitian lewat model regresi berganda dinyatakan:

**H 2: Terdapat pengaruh Sistem Akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dalam memenuhi kewajiban pajak.**

Hasil perhitungan regresi linier berganda menunjukkan nilai t (uji individual) signifikan dibawah 0,5 yaitu sebesar 4,546 pada tingkat signifikansi (p value) sebesar 0,0001. Ini berarti bahwa Sistem Akuntansi memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Dengan hasil ini berarti hipotesis nol ditolak dan tidak sanggup menolak hipotesis alternatif.

Hipotesis alternatif ketiga yang di uji dalam penelitian kali ini dinyatakan:

**H 3: Terhadap pengaruh Prosedure Pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dalam memenuhi kewajiban pajak.**

Hasil perhitungan regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai t hitung menghasilkan angka signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 2,305, pada tingkat signifikansi (P value) sebesar 0,0266. Ini berarti bahwa prosedur pengendalian memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Hasil ini menunjukkan bahawa dalam penelitian ini menolak H nol dan tidak sanggup menolak H alternatif.

#### 4.6. Pembahasan

Penelitian yang telah dilakukan cukup menarik, karena dari survei dan tanya jawab dengan obyek penelitian banyak ditemukan berbagai hal menarik yang membutuhkan pengkajian dan sikap kebijakan pemerintah dalam penataan perpajakan perhotelan dan sekaligus menunjukkan sikap keadilan bagi setiap kalangan masyarakat.

Penggalian sumber dana lewat pajak hotel dalam rangka mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), patut untuk ditingkatkan, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masih dapat ditingkatkan industri perhotelan yang ada di kota Semarang, kondisi ini didukung wilayah Semarang selaku daerah tingkat I yang memiliki akses pengembangan industri baik industri pariwisata maupun industri lain, yang tentu saja memiliki akses langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan tingkat hunian kamar hotel.

Namun hal yang tak dilupakan bagi pemerintah adalah perlunya pembinaan dan penyediaan vasilitas fisik dan keamanan untuk mendukung iklim daerah yang dapat mendukung perkembangan industri ini.

Dalam kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang telah diteliti dalam penelitian kali ini bahwa tiga variabel independen yang dimasukkan dalam model yang di-*ekpectasi*-kan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian ternyata ketiganya memiliki nilai signifikan. Kondisi ini dibuktikan dengan hasil Uji bersama-sama semua variabel independen terhadap

variabel dependen atau uji F yang menghasil nilai F sebesar 8,59300 dengan tingkat signifikansi (P value) sebesar 0,0002 pada alfa 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut signifikan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen-nya.

Hasil ini sesuai dengan kejadian dilapangan, bahwa bagi perusahaan yang *internal control* baik, memiliki kecenderungan tingkat validitas dan keakuratan data akuntansi terjamin, dimana yang pada proses akhir akan menghasilkan laporan keuangan. Khusus bagi laporan rugi laba yang merupakan bagian dari laporan keuangan yang dijadikan sumber perhitungan pajak perusahaan, maka akan mendukung ketepatan perhitungan pajak yang akan disetorkan ke kas negara. Disamping hal tersebut diatas, hasil penelitian ini juga mendukung kondisi dalam praktek dilapangan bahwa perusahaan yang internal kontrolnya baik, memiliki kecenderungan melakukan praktek yang sehat, ditaatinya sistem dan prosedur manajemen. Dengan ditaatinya sistem dan prosedur manajemen serta praktek yang sehat maka dalam melakukan kewajiban perpajakan juga akan baik.

Variabel lingkungan pengendalian secara statistik signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan, dengan hasil t hitung 1,641, pada tingkat p value 0,1089 dengan alfa 15%. Dengan demikian maka hipotesis nol ditolak dan menerima hipotesis alternatif. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil Suharto (1995) yang merekomendasikan bahwa SPT yang dilampiri laporan auditor independen, kecil kemungkinan dilakukan tindakan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa Lingkungan pengendalian yang merupakan bagian lingkungan audit bagi auditor independen dalam penugasan, akan

memberi warna laporan auditor independen. Sebab jika lingkungan pengendalian kurang baik auditor akan memberi opini pengecualian, dan hal ini akan berpengaruh terhadap pertimbangan instansi pajak dalam memberikan kepercayaan perusahaan pada ketepatan perhitungan pajak ketika SPD dilaporkan. Hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan kondisi dilapangan sangat sinkron, karena lingkungan pengendalian perusahaan yang baik, maka akan membentuk budaya kerja yang disiplin, baik dari sudut pandang prosedur, maupun ketepatan kegiatan, dengan demikian pekerjaan akan terselesaikan dengan sistematis, dan terjadi internal cek antar pelaksana maupun antar departemen. Wajar jika hasil pajak yang disampaikan juga valid.

Variabel Sistem Akuntansi secara statistik signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan. Signifikansi ini dibuktikan dengan hasil Uji regresi partial dimana diperoleh angka t hitung 4,546 pada tingkat alfa 5% dengan nilai P value 0,0001. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada hakekatnya sistim akuntansi memiliki implikasi terjadinya *cek and recek* dimasing-masing departemen sehingga dapat terselenggara pola praktek kerja yang sehat. Disamping itu juga pola pelaksanaan sistem dan prosedur akan mewujudkan pola kerja yang mendukung terjadinya pengolahan data secara valid dan mengeliminir tindakan kecurangan sehingga dapat berimplikasi pada perhitungan, pelaporan serta pembayaran pajak secara tepat. Hasil ini sesuai dengan kaidah teori, seperti yang tersirat pada standar Profesional Akuntansi Publik (1994 :319.5) (Bodnar and

Hopwood 1995) bahwa sistem akuntansi yang efektif mempertimbangkan pembuatan, metode dan catatan yang akan :

1. mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah,
2. menggambarkan transaksi secara tepat waktu dan rinci sehingga memungkinkan pengelompokan transaksi secara semestinya untuk pelaporan keuangan,
3. mengukur nilai transaksi dengan cara yang memungkinkan pencatat nilai keuangan yang layak dalam laporan keuangan,
4. menentukan periode terjadinya transaksi untuk memungkinkan pencatatan transaksi pada periode akuntansi yang semestinya,
5. menyajikan dengan semestinya transaksi dan pengungkapannya dalam laporan keuangan .

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Kiryanto (1998), yang merekomendasikan bahwa penerapan pengendalian intern memiliki hubungan yang positif dengan kepatuhan wajib terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel ketiga yang lain diuji dalam penelitian ini yaitu prosedur pengendalian, sesuai dengan hasil perhitungan regresi berganda menunjukkan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib dalam melakukan kewajiban pajak. Hasil ini ditunjukkan dengan hasil t hitung sebesar 2,305 pada alfa 5% dengan tingkat p value 0,0266. Bila dikaitkan dengan kondisi lapangan, maka hasil penelitian ini sesuai dengan kejadian riil, karena bagi perusahaan yang dapat mengimplementasikan sistem dan prosedur pengendalian maka akan terjadi *cek* dan *recek* terhadap para petugas pelaksana atau departemen. Hal ini sesuai dengan kaidah prosedur pengendalian yang setiap kegiatan harus dilakukan pemisahan fungsi dalam

menyelesaikan suatu aktifitas. Disamping itu dalam prosedur pengendalian juga hendaknya dibuat suatu dokumen yang mencerminkan *internal control*. Hasil penelitian ini bila dikaitkan dengan kaidah teori juga mendukung, yang menyatakan: menurut standar Profesional akuntansi Publik (1994:319.6), (Bodnar and Hopwood, 1995 ) prosedur pengendalian dapat dikelompokkan ke dalam prosedur yang bersangkutan dengan :

1. otorisasi yang semestinya atas transaksi dan kegiatan,
2. pemisahan tugas yang mengurangi kesempatan yang memungkinkan seseorang dalam posisi yang dapat melakukan dan sekaligus menutupi kekeliruan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari . Oleh sebab itu tanggungjawab untuk memberikan otorisasi transaksi, mencatat transaksi , dan menyimpan aktiva perlu dipisahkan dengan karyawan yang berbeda,
3. perancangan dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai untuk membantu secara semestinya transaksi dan peristiwa,
4. pengamanan yang cukup atas akses dan penggunaan aktiva perusahaan dan catatan,
5. pengecekan secara independen atas pelaksanaan dan penilaian yang semestinya atas jumlah yang dicatat.

Dengan dipatuhinya prosedur pengendalian oleh perusahaan, maka perusahaan akan melakukan kegiatan dengan praktek yang sehat, bila hal itu yang terjadi sudah pasti perusahaan akan melakukan praktek perpajakan secara benar dan tanggungjawab.

#### **4.7. Implikasi Hasil Penelitian**

Didepan telah disebutkan bahwa dalam uji regresi linier berganda menghasilkan baik uji partial maupun uji bersama antara variabel independen dengan variabel dependen menunjukkan secara statistik signifikan. Dalam uji bersama yang ditunjukkan dengan F hitung menghasilkan nilai  $t_{i,8,59300}$  pada P value (lihat tabel 4.8) 0,0002 di tingkat alfa 5%, dengan demikian seluruh variabel independen yaitu sistem akuntansi, lingkungan pengendalian dan prosedur pengendalian secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan selaku variabel dependen.

Sementara sesuai dengan uji parsial (uji t), menghasilkan secara individual baik sistem akuntansi, lingkungan pengendalian maupun prosedur pengendalian secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari hasil penelitian ini berimplikasi:

##### **4.7.1. Implikasi Bagi Manajemen**

Perpajakan yang merupakan kewajiban setiap wajib pajak yang menurut undang-undang memiliki daya ikat dan daya paksa, harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena, jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan atau melanggar pajak, maka akan dikenakan sanksi perpajakan.

Untuk dapat menyakinkan kepada pihak pajak, perusahaan hendaknya menggunakan sistem pengendalian intern yang baik, agar supaya tercipta pengamanan harta perusahaan, validitas data terjamin, yang pada gilirannya hasil

perhitungan pajak, pelaporan dan pembayaran pajak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian Suharto (1995) merekomendasikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang dilampiri laporan audit independen kecil kemungkinan dilakukan tindakan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Sementara Kiryanto (1998) merekomendasikan Penerapan Struktur Pengendalian Intern mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak Badan dalam memenuhi kewajiban Pajak Badan atas Pajak Penghasilan.

Hasil perhitungan regresi linier berganda, uji partial variabel lingkungan pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan signifikan pada t hitung sebesar 1,641 dengan P Value 1,1089 pada alfa 15%. Atas dasar hasil penelitian ini dan kesesuaian dengan hasil penelitian sebelumnya maka seharusnya perusahaan membentuk lingkungan pengendalian yang baik, karena hal itu merupakan pertimbangan auditor dalam penugasan audit dan sekaligus berimplikasi pada bentuk opini yang akan disampaikan. Pada akhirnya lingkungan pengendalian akan memberi warna dipatuhinya sistem dan prosedur pelaksanaan kegiatan sehingga memungkinkan terjadinya pola kepatuhan kerja yang diharapkan berimplikasi pada hasil kerja termasuk juga pada kepatuhan dalam perpajakan.

Hasil statistik pada variabel Sistem akuntansi menunjukkan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Tingkat signifikansi pengaruh ini ditunjukkan dengan hasil t hitung 4,546 pada P value sebesar 0,0213 yang berada jauh dibawah 5% (Singgih Santoso, 2000) Hasil ini sesuai dengan

kaidah dan efektifitas sistem akuntansi yang mempertimbangkan (George H. Bodnar and William Hopwood, 1995):

1. mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah,
2. menggambarkan transaksi secara tepat waktu dan rinci sehingga memungkinkan pengelompokkan transaksi secara semestinya untuk pelaporan keuangan,
3. mengukur nilai transaksi dengan cara yang memungkinkan pencatat nilai keuangan yang layak dalam laporan keuangan,
4. menentukan periode terjadinya transaksi untuk memungkinkan pencatatan transaksi pada periode akuntansi yang semestinya,
5. menyajikan dengan semestinya transaksi dan pengungkapannya dalam laporan keuangan.

Jadi bagi perusahaan yang memiliki sistem akuntansi yang baik akan mampu menghasilkan pelaporan yang valid dan akurat, sehingga termasuk didalamnya akan menghasilkan perhitungan perpajakan yang valid pula. Agar supaya perhitungan perpajakan baik dan tidak menimbulkan kurang percaya diri dinas perpajakan dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak maka perusahaan hendaknya ,menyusun sistem akuntansi yang baik.

Hasil perhitungan Regresi linier berganda pada variabel independen ke tiga yaitu prosedur pengendalian menghasilkan t hitung sebesar 2,305 pada tingkat P value 0,0266 pada alfa 5%, hasil ini menunjukkan bahwa bagi perusahaan yang prosedur pengendalian baik akan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam perpajakan. Hasil ini sesuai dengan kaidah teoritis yang dinyatakan: Menurut standar Profesional Akuntan Publik (1994:319.6), (George H. Bodnar and William Hopwood, 1995 )

prosedur pengendalian dapat dikelompokkan ke dalam prosedur yang bersangkutan dengan :

1. otorisasi yang semestinya atas transaksi dan kegiatan,
2. pemisahan tugas yang mengurangi kesempatan yang memungkinkan seseorang dalam posisi yang dapat melakukan dan sekaligus menutupi kekeliruan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Oleh sebab itu tanggungjawab untuk memberikan otorisasi transaksi, mencatat transaksi, dan menyimpan aktiva perlu dipisahkan dengan karyawan yang berbeda,
3. perancangan dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai untuk membantu secara semestinya transaksi dan peristiwa,
4. pengamanan yang cukup atas akses dan penggunaan aktiva perusahaan dan catatan,
5. pengecekan secara independen atas pelaksanaan dan penilaian yang semestinya atas jumlah yang dicatat.

Perusahaan yang memiliki prosedur pengendalian yang baik cenderung mampu menghasilkan pelaporan yang baik serta terjadi pengamanan *assets* perusahaan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa prosedur pengendalian akan menciptakan: pemisahan fungsi, setiap transaksi harus memperoleh otorisasi pihak yang berwenang, penggunaan dokumen yang mencerminkan *internal control*, terjadi *cek and recek*, sehingga akan menghasilkan validitas data termasuk didalamnya valid dalam perhitungan pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak yang memunculkan kepatuhan dalam perpajakan. Atas dasar hasil penelitian tersebut dan kaidah pengendalian intern maka agar perusahaan

memperoleh kepercayaan pihak perpajakan dan sekaligus menghindari koreksi pajak, maka perusahaan hendaknya menerapkan prosedur pengendalian yang baik dan tegas.

#### **4.7.2. Implikasi Bagi Pihak Luar Manajemen**

Perpajakan yang merupakan bentuk iuran masyarakat ke kas negara yang akan digunakan untuk pengeluaran negara dimana dalam kasus ini adalah pajak perhotelan yang merupakan pajak daerah yang akan digunakan untuk keperluan daerah mempunyai berimplikasi besar pada peningkatan pendapatan asli daerah. Terlebih dalam masa reformasi sekarang ini dimana otonomi daerah berimplikasi pada kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga wujud pajak jenis ini amat dibutuhkan daerah sebagai sumber penerimaan daerah. Hasil penelitian ini sangat penting dalam memberikan masukan pada daerah untuk mengformulasikan kebijakan daerah tentang perpajakan lewat instansi pajak daerah, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak perhotelan di daerah.

Signifikansi perhitungan regresi linier berganda baik secara keseluruhan maupun partial variabel independen (lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian) berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Hasil ini memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah instansi pajak daerah untuk dapat mencermati dan mengembangkan pola pengawasan lewat kebijakan tentang hal tersebut diatas, guna meningkatkan dan merangsang terhadap kepatuhan wajib pajak.

## BAB. V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Hasil perhitungan regresi linier berganda baik dengan menggunakan uji bersama-sama (F test) maupun uji individual (t test) memberikan hasil signifikan terhadap variable dependen. Adapun temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses penelitian dilapangan menemukan beberapa hal penting yang patut ditindak lanjuti oleh pemerintah (instansi pajak) yaitu masih terdapat celah yang menunjukkan kekurangpatuhan wajib pajak, terutama tentang validitas perhitungan pajak yang dilaporkan. Mengingat hasil perhitungan regresi linier berganda bahwa semua variabel yang dimasukkan dalam model ( lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian) signifikan, maka seharusnya pemerintah memformulasikan standar pengawasan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan item tersebut diatas. sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.
2. Hasil perhitungan regresi linier berganda uji secara bersama-sama, dimana seluruh variabel independen yang dimasukkan kedalam model dan secara bersama-sama diuji terhadap variabel dependen-nya (kepatuhan wajib pajak) ternyata hasilnya sangat signifikan, yang dibuktikan dengan hasil F hitung memperoleh nilai 8,59300, dengan P value 0,0002 pada tingkat alfa 5%. Hasil ini memberi bukti bahwa seluruh variabel independen (lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian) secara bersama-sama berpengaruh

terhadap variabel dependen-nya (kepatuhan wajib pajak). Hasil ini berarti jika perusahaan memiliki lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian baik, memiliki kecenderungan melakukan praktek manajemen yang sehat, sehingga mendukung melakukan kewajiban perpajakan selaku wajib pajak dengan patuh dan konsisten.

3. Sedang hasil dari regresi partial menunjukkan hasil variabel lingkungan pengendalian signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didasarkan pada hasil  $t$  hitung sebesar 1,641, dengan nilai  $P$  value 1,1089 yang berada jauh dibawah alfa 15%. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lingkungan pengendalian baik, maka akan meningkatkan kepatuhan pelaksana dalam perusahaan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan kondisi dilapangan yang mengidentifikasikan bahwa bagi perusahaan yang lingkungan pengendaliannya baik akan menciptakan kondisi yang:
  - a. Falsafah manajemen dan gaya usaha yang mencerminkan praktek yang sehat
  - b. Struktur organisasi yang berjalan pada garis yang benar, dalam bentuk pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas, sehingga setiap kegiatan selalu diikuti pertanggungjawaban.
  - c. Terjadi *internal control* dan terjadi *quality control* yang efektif.
  - d. Kebijakan kepersonaliaan yang berjalan baik dan tidak meniggalkan unsur keadilan, dan lain-lain.
4. Hasil uji *partial* pada variabel independen (Sistem Akuntansi) juga menunjukkan hasil signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) yang ditunjukkan nilai  $t$  hitung sebesar 4,546, dengan  $P$  value 0,0001 yang berada

dibawah alfa 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki sistem akuntansi yang baik cenderung melakukan pendataan data secara valid, serta mendukung dalam penciptaan kondisi yang patuh pada perpajakan. Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki sistem akuntansi yang baik cenderung:

- a. Semua transaksi yang terjadi secara banar dan valid
- b. pencatatan transaksi secara tepat waktu dan cukup rinci
- c. transaksi yang terjadi dinilai secara layak
- d. periode transaksi secara tepat
- e. menyajikan transaksi dan mengungkapkan laporan

Dalam kondisi seperti ini wajar bila perusahaan yang memiliki sistem akuntansi baik memiliki kecenderungan untuk melakukan kepatuhan terhadap pajak, terutama kevalidan dalam perhitungan perpajakan.

5. Dalam penelitian ini juga menemukan bahwa hasil perhitungan regresi linier berganda secara *partial* variabel prosedur pengendalian selaku variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak selaku variabel dependen-nya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil t hitung sebesar 2,305 dengan P value 0,0266 pada tingkat alfa 5%. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa bagi perusahaan yang prosedur pengendaliannya baik maka memiliki kecenderungan melakukan kepatuhan dalam perpajakan. Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa perusahaan yang prosedur pengendaliannya baik maka akan melakukan praktek yang sehat, ditunjukkan dengan:

- a. Dilakukan pemisahan tugas dan fungsi antar departemen maupun pelaksana secara tegas
- b. prosedur otorisasi bagi yang berwenang berjalan dengan baik
- c. Transaksi dicatat dan didokumenkan pada dokumen yang mencerminkan *internal control*
- d. pengendalian fisik atas kekayaan secara benar serta dilakukan pencatatan dan penyesuaian antara catatan dengan fisik
- e. pengecekan secara independen atas kinerja para pekerja atau pelaksana.

Dengan efektifnya hal tersebut diatas maka kepatuhan wajib pajak dapat terlaksana dengan baik.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak mengandung keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain:

Populasi dalam penelitian ini yang berupa hotel-hotel di kota Semarang, dimana hotel tersebut terbagi atas beberapa kelas dimana masing-masing kelas tidak terdistribusi secara normal atau standar deviasi tinggi. Hal ini dapat dilihat untuk hotel kelas bintang 5 hanya 1 hotel, jauh dibandingkan hotel kelas melati yang mencapai 43 hotel. Sementara kepatuhan dan validitas pelaporan antara hotel besar dengan hotel kecil jelas berbeda. Merujuk hasil penelitian Nor Hadi (2001) yang merekomendasikan luas *voluntary disclosure* dipengaruhi oleh *size* perusahaan, dimana semakin besar perusahaan semakin berani atau semakin luas pengungkapan yang dilakukan dalam laporan keuangan. Munculnya indikasi ini menunjukkan

terdapat kelemahan penelitian ini, karena hasil dari kesimpulan dalam penelitian ini sifatnya di generalisir baik hotel besar maupun hotel kecil. Sementara tingkat validitas antara kelas hotel berbeda.

### **5.3. Saran untuk Penelitian yang akan Datang**

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Penelitian ini hanya terkonsentrasi satu kota yaitu kota Semarang, sehingga berimplikasi pada standar deviasi sample menjadi cukup besar, diharapkan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup sample yang lebih luas, sehingga mampu menggeneralisasi hasil.
2. Tiga variabel independen yang dimasukkan dalam model berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), sehingga masih banyak variabel lain yang berpengaruh dan tidak dimasukkan dalam model ini. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil  $R^2$  0,39795, yang berarti bahwa variabel independen (lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian) dapat menjelaskan sebesar 0,39795 terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tak masuk dalam model ini. Untuk itu bagi penelitian selanjutnya hendaknya memasukan variabel lain yang dimasukkan dalam model.
3. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk mencoba dengan menguji menggunakan regresi non linier.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A, and James K. Loebbecks, 1991, *Auditing An Integrated Approach*, Fourth Edition, New Jersey : Prentice – Hall Inc.
- Atmaja , Lukas setia, 1997, *Memahami Statistika Bisnis*, Buku 1 & 2, Yogyakarta : ANDI.
- Amudi Pasaribu 1983, *Pengantar Statistk*: Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bodnar, George H, and William S Hopwood, 1990, *Accounting Information Systems*, Fourth Edition, Boston : Allyn and Bacon.
- Carmichael, W.J, 1980, *Practical Non Parametric Statistic*, Second Edition, New York : Mc. Graw- Hill Book Company.
- Djarwanto PS, 1996, *Mengenal Beberapa Uji Statistik dalam Penelitian*, Yogyakarta : Liberty.
- Earata, I Made Gede, *Tax Potential Indicator System (TPIS), Dalam Taxation and Development* , Jakarta : Indonesian-Gherman Government Cooperation.
- Gunawan Sumodiningrat, *Pengantar Ekonometrika*: Yogyakarta, BPFE Yogyakarta.
- ....., 1998, *Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel dan Restoran*, Semarang : Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta : BPFE.
- Kiryanto, 1998, *Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya*, Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Mardiasmo,1994, *Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty
- Mulyadi,, 1992, *Pemeriksaan Akuntansi*, Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YKPN.
- Nor Hadi, 2000, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukaela pada Laporan Tahunan Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Jakarta*, Semarang: Universitas Diponegoro

Singgih Santoso, 2001 *SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta, PT. Slerx Media Komputindo Kelompok Granedia Jakarta

Imam Ghozali, 2001, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Rochmat Soemitra, 1998, *Pajak dan Pembangunan*, Edisi Rtevisi, Bandung, Eresco.

Sugiyono, 2000, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : CV Alfabeta.

Suharto, 1995, *Hubungan Laporan Audit Akuntan Publik dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak dengan Keputusan Tindak Pemeriksaan di Propinsi Jawa Timur*, Thesis, Bandung:Unpad

Waluyo dan Richard Burton, 1997, *Ketentuan Undang-Undang Baru di Bidang Perpajakan Tahun 1997*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.